

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Partisipasi

Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Model Tangga Partisipasi yang dikembangkan oleh Arnstein (1969) menjadi salah satu kerangka kerja paling berpengaruh dalam memahami tingkat partisipasi masyarakat. Model ini membagi partisipasi ke dalam delapan tingkatan yang dikelompokkan dalam tiga kategori utama:

- (1) Non-Partisipasi
 - (a) *Manipulation*, masyarakat hanya menjadi alat propaganda, tanpa keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan.
 - (b) *Therapy*, masalah sosial masyarakat dianggap sebagai isu psikologis yang perlu "diperbaiki," bukan sebagai persoalan struktural yang harus ditangani melalui partisipasi aktif.
- (2) Partisipasi Semu (*Tokenisme*)
 - (c) *Informing*, masyarakat hanya diberi informasi tanpa memberikan masukan.
 - (d) *Consultation*, masyarakat dimintai pendapat, tetapi tidak ada jaminan bahwa masukan mereka akan diterapkan.
 - (e) *Placation*, masyarakat diberikan sedikit pengaruh dalam keputusan, tetapi kontrol utama tetap di tangan pemegang kekuasaan.
- (3) Partisipasi Nyata (*Citizen Power*)
 - (f) *Partnership*, masyarakat dan pemerintah atau lembaga eksternal memiliki peran setara dalam pengambilan keputusan.
 - (g) *Delegated Power*, masyarakat memiliki kontrol signifikan atas keputusan, meskipun dengan batasan tertentu.
 - (h) *Citizen Control*, masyarakat memiliki kendali penuh atas proses dan hasil pembangunan, menunjukkan tingkat partisipasi tertinggi.

Model Arnstein ini membantu memahami bahwa tidak semua bentuk partisipasi bersifat sejati. Banyak program pembangunan melibatkan masyarakat hanya secara simbolis, tanpa memberikan mereka kekuasaan nyata dalam pengambilan keputusan (Arnstein, 1969).

Dalam partisipasi, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah modal sosial (Fahreza, 2022). Modal sosial merujuk pada kumpulan sumber daya, baik yang sudah ada maupun yang berpotensi, yang dapat diakses melalui keanggotaan dalam jaringan hubungan yang telah terstruktur, dengan dasar pengakuan serta kepercayaan bersama (Bourdieu, 1986). Menurut Putnam (1993), modal sosial terdiri dari 3 komponen utama, yaitu :

- (1) Kepercayaan (*Trust*), meningkatkan kerja sama dan mengurangi ketidakpastian dalam interaksi sosial.
- (2) Norma Sosial (*Norms*), aturan atau nilai yang mengatur perilaku anggota masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan.
- (3) Jaringan Sosial (*Network*), hubungan antarindividu atau kelompok yang memfasilitasi pertukaran informasi, sumber daya, dan dukungan sosial.

Selain modal sosial, faktor seperti motivasi juga ikut dalam mempengaruhi partisipasi (Mandasari dan Maesaroh, 2016). Motivasi berasal dari kata Latin *movere*, yang berarti bergerak. Berasal dari kata dasar *motif*, motivasi dalam diri seseorang merupakan dorongan internal yang mendorong individu untuk melakukan berbagai aktivitas demi mencapai tujuan yang diinginkan (Hasibuan, 2010). Menurut Maslow (1943) dalam Khasanah (2022) motivasi merupakan hasil dari upaya individu dalam memenuhi lima kebutuhan dasar, yaitu fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan ini dapat menciptakan tekanan internal yang memengaruhi perilaku seseorang. Seseorang baru dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat tertentu dalam piramida jika kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah telah terpenuhi. Oleh karena itu, Maslow mengidentifikasi lima motif utama:

- (1) Motif Fisiologis, berasal dari kebutuhan dasar tubuh yang harus dipenuhi.
- (2) Motif Keamanan, meliputi perlindungan fisik, keamanan di lingkungan kerja, dan jaminan keselamatan dalam bekerja.
- (3) Motif Sosial, dorongan untuk membangun persahabatan, menjalin hubungan interpersonal yang erat, serta meningkatkan interaksi dengan orang lain.
- (4) Motif Penghargaan, keinginan untuk dihormati, mendapatkan apresiasi atas pencapaian, serta pengakuan terhadap kemampuan dan keterampilan seseorang.

- (5) Motif Aktualisasi Diri, tingkatan tertinggi dalam hierarki kebutuhan Maslow, yang berkaitan dengan pengembangan potensi diri secara maksimal.

Untuk memahami partisipasi warga, teori perilaku dapat digunakan sebagai pendekatan. Salah satu teori yang dapat menganalisis perilaku individu adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen. TPB berfungsi sebagai kerangka teoretis dalam meneliti faktor-faktor yang memengaruhi keputusan seseorang dalam memilih suatu perilaku. Teori ini telah banyak diterapkan dalam berbagai studi untuk menganalisis perilaku manusia (Astuti dan Linarti, 2020). Oleh karena itu, Ajzen (1991) mengidentifikasi tiga faktor yang mempengaruhi niat konseptual yaitu :

- (1) Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude toward the behavior*), penilaian positif mendorong individu untuk berperilaku baik, dengan harapan dampak positif.
- (2) Norma Subjektif (*Subjective Norm*), tekanan sosial dari lingkungan dapat memotivasi atau menghambat perilaku individu.
- (3) Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*), Kesulitan atau kemudahan dalam melakukan perilaku membantu memahami batasan yang dihadapi individu.

2.1.2 Credit Union

Credit Union (CU) berperan sebagai pelaku ekonomi lokal dengan mendistribusikan dana melalui pengeluaran operasional serta layanan kepada anggota, seperti pinjaman dan bunga tabungan, yang memperkuat ekonomi dan menciptakan efek multiplikasi lebih berkelanjutan dibandingkan perusahaan luar. Selain dampak ekonomi, CU juga meningkatkan kohesi sosial melalui keterlibatan sukarela, rasa kebanggaan lokal, dan dukungan terhadap usaha serta kesejahteraan masyarakat (Jones, McGinn, dan Money, 2020). Secara historis, CU pertama kali muncul di Jerman pada abad ke-19 sebagai respons terhadap dampak revolusi industri yang memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Franz Hermann Schulze-Delitzsch berfokus pada swadaya ekonomi di perkotaan, sementara Friedrich Wilhelm Raiffeisen menekankan solidaritas untuk membantu petani miskin di pedesaan. Meski berbeda, keduanya menerapkan prinsip koperasi untuk menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan formal (Djabaruddin, 1995 *dalam* Sugiarto dan Alika, 2014).

Gerakan CU di Indonesia berakar dari pengaruh *Heddesdorfer Credit Union* yang didirikan oleh Raiffeisen di Jerman, dengan prinsip kemandirian, solidaritas, dan pendidikan. CU masuk ke Indonesia pada 1950-an melalui koperasi simpan pinjam berbasis Raiffeisen, tetapi sempat menghadapi tantangan akibat inflasi pada masa Orde Lama yang mengalihkan fokus koperasi menjadi konsumsi. Stabilitas ekonomi pada masa Orde Baru memungkinkan pengembangan kembali CU dengan dukungan *World Council of Credit Unions* (WOCCU) dan tokoh seperti Pastor Karim Arbie, SJ. Pada 1970, *Credit Union Counselling Office* (CUCO) dibentuk untuk mempromosikan CU, yang kemudian berkembang menjadi Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) dan kini dikenal sebagai Inkopdit. CU pertama di Indonesia, CU Kemuning, didirikan pada 7 Desember 1970 di Bandung, diikuti oleh CU Swapada di Jakarta pada 1971. Sejak itu, gerakan CU terus berkembang melalui pelatihan dan koordinasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi menengah ke bawah (Munte, 2022).

Inkopdit, sebagai organisasi yang menyatukan gerakan koperasi kredit di Indonesia sekaligus bagian dari jaringan koperasi kredit global, senantiasa menjalankan prinsip-prinsip koperasi kredit yang telah disepakati dalam WOCCU pada 24 Agustus 1984. Yaitu :

- (a) Struktur Demokratis
 - (1) Keanggotaan terbuka dan sukarela
 - (2) Pengawasan secara demokratis
 - (3) Bebas dari diskriminasi
- (b) Pelayanan kepada Anggota
 - (1) Memberikan layanan yang berfokus pada kebutuhan anggota
 - (2) Distribusi manfaat kepada anggota
 - (3) Menjamin stabilitas keuangan
- (c) Tujuan Sosial
 - (1) Penyediaan pendidikan berkelanjutan
 - (2) Meningkatkan kerja sama antar koperasi
 - (3) Mengedepankan tanggung jawab sosial

ACCU (*Asian Confederation of Credit Unions*) sebagai asosiasi CU di seluruh Asia menyampaikan konsep CU, serta nilai dan prinsip koperasi yang

selaras dengan standar yang ditetapkan oleh ICA (*International Cooperative Alliance*). Informasi ini dapat diakses melalui situs resmi mereka di <http://www.aaccu.coop/>.

CU adalah lembaga keuangan berbasis koperasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya. Tujuan utamanya adalah mempromosikan kebiasaan menabung, menyediakan kredit dengan tingkat bunga yang wajar, serta memberikan layanan keuangan lainnya kepada anggota.

Koperasi didirikan atas dasar nilai-nilai swadaya, tanggung jawab pribadi, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Dalam tradisi pendirinya, anggota koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan prinsip yaitu:

- (1) Keanggotaan Sukarela dan Terbuka, koperasi merupakan organisasi sukarela yang terbuka bagi semua orang tanpa diskriminasi gender, sosial, ras, politik, atau agama, selama mereka mampu memanfaatkan layanan koperasi dan menerima tanggung jawab keanggotaan.
- (2) Pengendalian Anggota Secara Demokratis, koperasi dikendalikan oleh anggotanya melalui partisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Setiap anggota memiliki hak suara yang setara.
- (3) Partisipasi Ekonomi Anggota, anggota berkontribusi secara adil dan mengendalikan modal koperasi secara demokratis. Surplus dialokasikan untuk pengembangan koperasi, manfaat anggota berdasarkan transaksi, dan mendukung kegiatan lain yang disetujui anggota.
- (4) Otonomi dan Kemandirian, koperasi merupakan organisasi mandiri yang dikontrol oleh anggotanya. Jika bekerja sama dengan pihak lain, koperasi tetap mempertahankan kendali demokratis dan otonominya.
- (5) Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi, koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, perwakilan terpilih, manajer, dan karyawan untuk mendukung pengembangan koperasi secara efektif.
- (6) Kerja Sama Antar Koperasi, koperasi memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
- (7) Kepedulian terhadap Komunitas, koperasi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di komunitas melalui kebijakan yang disetujui anggotanya.

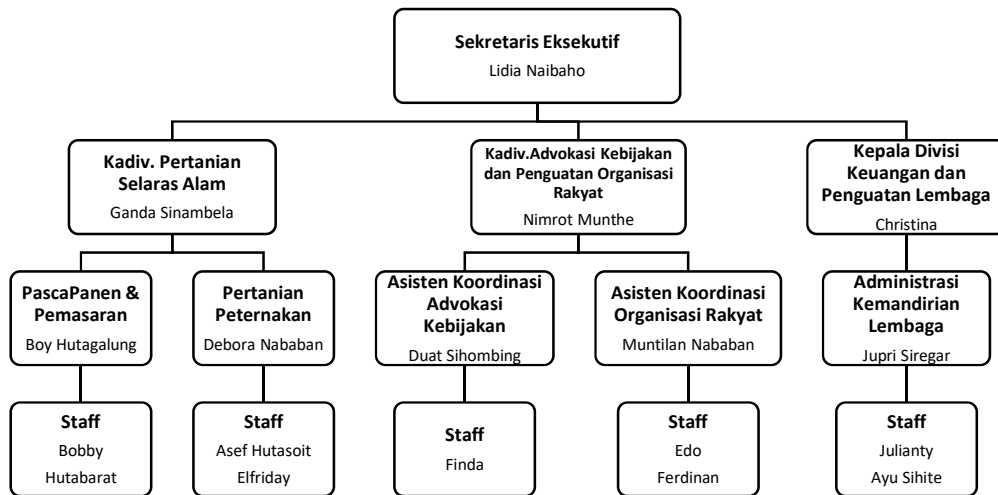
2.1.3 Yayasan Petrasa

Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rakyat Selaras Alam (Petrasa) adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada 21 Juli 2001 oleh akademisi, teolog, dan aktivis yang peduli terhadap kondisi petani, khususnya di dataran tinggi Sumatera Utara. Organisasi ini lahir sebagai respon terhadap dampak modernisasi dan industrialisasi yang meskipun membawa harapan baru, turut memunculkan berbagai masalah seperti ketidakadilan hukum, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketergantungan pada teknologi yang tidak ramah lingkungan. Perubahan ini juga mengakibatkan degradasi nilai masyarakat agraris dan eksploitasi alam yang tidak seimbang, sehingga mengancam sistem pertanian yang harmonis dengan alam. Petrasa berupaya mengembalikan pertanian ke sistem selaras alam dengan menggali dan mengembangkan teknologi lokal, kearifan lokal, serta kesadaran petani dan konsumen akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui penguatan organisasi petani dan pendampingan kelompok tani dalam pertanian organik, Petrasa mendukung pengelolaan pertanian yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal, khususnya di Kabupaten Dairi. Menaungi petani di 12 Kecamatan meliputi Kecamatan Berampu, Lae Parira, Parbuluan, Pegagan Hilir, Sidikalang, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu Hulu, Silima Pungga-Pungga, Sumbul, Sitinjo dan Tigalingga.

Petrasa memiliki visi untuk mewujudkan petani selaras alam yang berdaulat, bermartabat, dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut, Petrasa berkomitmen meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola pertanian dengan teknologi yang selaras alam, memperkuat posisi tawar organisasi petani agar mampu memperjuangkan hak-haknya, mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada petani, serta menciptakan pasar yang adil bagi keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan petani.

Pada tahun 2023, Yayasan Petrasa Dairi memperoleh investasi sebesar 377.000 Euro dari *Brot für die Welt* (BFDW), sebuah organisasi dari Jerman yang berfokus pada isu ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, akses air, penguatan demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, perdamaian, dan keberlanjutan lingkungan. BFDW berkomitmen untuk memastikan setiap individu memiliki akses

yang memadai terhadap pangan, terutama menghadapi tantangan kelaparan akibat perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya. Proyek-proyek BFDW berfokus pada negara-negara Global Selatan, dengan menjalin hubungan erat dengan mitra lokal, termasuk gereja, serta menyediakan dukungan spesialis dan relawan sesuai kebutuhan. Pada tahun 2022, total pendapatan BFDW mencapai 338,6 juta Euro, yang bersumber dari pendanaan negara (53,8%), sumbangan dan koleksi (22,3%), dana Layanan Pengembangan Gereja (19,1%), kontribusi Uni Eropa dan pihak ketiga lainnya (1,2%), serta sumber lain (3,6%).



Gambar 1. Struktur Organisasi Yayasan Petrasa

Adapun struktur kelembagaan pada Yayasan Petrasa Dairi yaitu mempunyai 3 Divisi serta 17 Staff berikut adalah pengertian masing-masing divisi serta staff :

(1) Pertanian Selaras Alam

Divisi Pertanian Selaras Alam berperan sebagai ujung tombak dalam mendukung petani melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek pascapanen, pemasaran, pertanian, dan peternakan. Divisi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi petani dengan solusi yang relevan dan berkelanjutan. Melalui pelatihan, pendampingan, serta penerapan teknologi modern dan nilai-nilai lokal, divisi ini memastikan petani memiliki akses ke pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha mereka.

Divisi ini juga mendukung petani dalam memasarkan hasil produk organik dengan memberikan pendampingan terkait sertifikasi mutu seperti sertifikasi

pamor. Langkah ini memastikan kualitas produk organik tetap terjaga dan diakui oleh konsumen, sambil memperluas pasar bagi produk tersebut. Selain itu, divisi ini memperkuat hubungan antarpetani melalui pengembangan organisasi berbasis solidaritas, gotong royong, dan kepercayaan, menciptakan iklim yang kondusif untuk keberhasilan usahatani bersama.

(2) Advokasi Kebijakan dan Penguatan Organisasi Rakyat

Divisi Advokasi Kebijakan dan Penguatan Organisasi Rakyat bertujuan memengaruhi kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan sosial guna mendukung visi Yayasan Petrasa Dairi. Selain itu, divisi ini memperkuat organisasi rakyat dengan membangun jaringan strategis di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Divisi ini juga memfasilitasi dialog serta advokasi terkait isu-isu strategis, seperti pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak masyarakat.

Saat ini, kegiatan advokasi yang menjadi fokus meliputi pengawasan dan advokasi terhadap konsesi lahan, seperti PT. Dairi Prima Mineral (SK.272.K/30/D/DJB/2018 dengan luas konsesi 24.636 ha) dan PT. Gruti (SK.386.MENLKH/SETJEN/HPL.0/10/2020 dengan luas konsesi 8.850 ha).

(3) Keuangan dan Penguatan Lembaga

Divisi Keuangan dan Penguatan Lembaga bertanggung jawab mengelola keuangan organisasi serta memperkuat kapasitas internal lembaga untuk memastikan keberlanjutan operasional dan pencapaian visi-misi Yayasan Petrasa. Salah satu fokus utama divisi ini adalah menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan mendukung kemandirian lembaga, sehingga lembaga tidak bergantung sepenuhnya pada pihak eksternal dalam operasionalnya.

2.1.4 Usahatani

Menurut Suratiah (2015) *dalam* Noravika (2024) usahatani adalah cabang ilmu yang mempelajari cara petani mengelola dan mengkoordinasikan faktor produksi secara efisien untuk mencapai keuntungan maksimal. Kegiatan usahatani mencakup pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen tanaman, serta pengelolaan hewan guna menghasilkan pangan, pakan, serat, bahan baku industri, dan pendapatan. Sebagai sektor vital dalam perekonomian, usahatani memainkan peran penting dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat dan bahan baku bagi industri. Di Indonesia, perkembangan ilmu usahatani memiliki perjalanan

panjang yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, budaya, dan aspek sosial-ekonomi di berbagai wilayah.

Menurut Soekartawi (1987) dalam Qamariyah (2021) usahatani dipengaruhi oleh faktor produksi (*input*) seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan sarana produksi yang mencakup benih, pupuk, pestisida, serta biaya pendukung lainnya. Lahan sebagai sumber daya utama menentukan produktivitas dan luas garapan, sedangkan tenaga kerja melibatkan curahan waktu dari persiapan hingga panen, baik melalui tenaga manusia, ternak, atau mesin. Modal mencakup biaya-biaya yang diperlukan untuk pengadaan sarana produksi dan operasional. Hasil usahatani (*output*) terdiri dari produk utama, seperti daging sapi dalam usaha penggemukan, dan produk tambahan, seperti pupuk organik dari kotoran sapi. Jumlah output dipengaruhi oleh produktivitas lahan, jenis komoditas, luas lahan, serta kondisi tanaman, sementara nilai produk bergantung pada jumlah, kualitas, harga pasar, waktu pemasaran, dan posisi petani dalam transaksi. Efisiensi usahatani dapat dicapai melalui pengelolaan input secara teknis untuk produksi tinggi dan secara ekonomis untuk keuntungan besar.

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani

Dari rumusan masalah serta landasan teoritis diatas, maka diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam pemanfaatan CU untuk mendukung usahatani yaitu:

A. Karakteristik Petani

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkaitan dengan karakteristik individu yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat (Fiansi, 2023). Menurut Fiansi dan Mirayanti (2020), karakteristik individu mencerminkan perbedaan dalam hal motivasi, inisiatif, ketahanan dalam menyelesaikan tugas, serta kemampuan menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan yang berhubungan erat dengan lingkungan yang memengaruhi kinerja seseorang.

Partisipasi masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan karakteristik individu, seperti jenis kelamin, latar belakang lingkungan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan (Maskur *et al.* 2023). Teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980) juga mendukung hal ini, dengan menyatakan bahwa faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, status sosial,

pendidikan, stratifikasi sosial, tingkat pendapatan, lama menetap, serta status kepemilikan tanah merupakan kerangka dasar dalam menganalisis partisipasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, analisis partisipasi petani dalam pemanfaatan CU untuk mendukung usahatani dilakukan menggunakan sub-variabel karakteristik petani sebagai berikut: (1) Usia; (2) Pendidikan; (3) Tingkat Pendapatan.

B. Modal Sosial

Modal sosial merupakan akumulasi sumber daya aktual maupun potensial yang terhubung dengan kepemilikan jaringan yang stabil. Jaringan ini terdiri dari hubungan yang formal atau informal, yang didasarkan pada saling mengenal dan pengakuan bersama. Modal sosial muncul dari keanggotaan seseorang dalam kelompok yang memberikan dukungan kepada anggotanya (Bourdieu, 1986).

Penelitian Fahreza (2022) menyatakan bahwa modal sosial merupakan salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi. Hal ini diperkuat oleh temuan Djelantik *et al.* (2023), menunjukkan aspek modal sosial seperti kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial sangat berperan dalam tahapan partisipasi. Sejalan dengan itu, teori modal sosial yang dikemukakan Putnam (1993) juga menegaskan bahwa kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat partisipasi individu dalam suatu kelompok.

Berdasarkan pemahaman tersebut, analisis partisipasi petani dalam pemanfaatan CU untuk mendukung usahatani akan dikaji menggunakan sub-variabel modal sosial sebagai berikut: (1) Kepercayaan (*Trust*); (2) Norma Sosial (*Norms*); (3) Jaringan Sosial (*Network*).

C. Motivasi

Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin *movere*, yang berarti bergerak, dan memiliki akar konsep dari motif, yaitu suatu dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak guna mencapai tujuan tertentu (Hasibuan, 2010). Motivasi menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam meningkatkan tingkat partisipasi individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks sosial maupun profesional (Mandasari dan Maesaroh, 2016). Pengaruh motivasi yang kuat dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan atau program tertentu, karena semakin tinggi dorongan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk terlibat secara aktif

dalam suatu aktivitas (Dalimunte *et al.* 2023).

Teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow (1943) memperkuat pandangan tersebut dan menjadi dasar dalam memahami bagaimana motivasi bekerja dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, teori Maslow dijadikan sebagai dasar dalam analisis ini untuk menjelaskan bagaimana individu terdorong untuk bertindak berdasarkan hierarki kebutuhannya. Menurut Maslow dalam Khasanah (2022), motivasi seseorang muncul dari usaha individu dalam memenuhi lima kebutuhan dasar, yang terdiri dari: (1) Kebutuhan fisiologis, seperti makan, minum, dan istirahat; (2) Kebutuhan akan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis; (3) Kebutuhan sosial, termasuk interaksi dan hubungan dengan orang lain; (4) Kebutuhan akan penghargaan, seperti pengakuan atas prestasi dan pencapaian; serta (5) Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu pencapaian potensi tertinggi dalam diri individu.

D. Perilaku Terencana

Untuk memahami partisipasi warga, teori perilaku dapat digunakan sebagai pendekatan analisis. Salah satu teori yang sering digunakan dalam mengkaji perilaku seseorang terkait pengelolaan sampah adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). TPB merupakan kerangka teoretis yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pilihan perilaku seseorang (Tonglet *et al.* 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Linarti (2020) menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi atas kendali perilaku secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat seseorang. Corbett (2010) juga menyatakan bahwa TPB telah terbukti efektif dalam memprediksi perilaku di berbagai konteks. Menurut Ajzen (1991), model TPB memiliki rekam jejak yang baik, dengan tiga variabel utama sikap, norma subjektif, dan persepsi atas kendali perilaku yang dapat menjelaskan 30-50% variasi dalam perilaku individu. Ketiga variabel tersebut membentuk niat seseorang, yang kemudian berpengaruh terhadap tindakan yang diambil.

2.2 Hasil Pengkajian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk memperjelas variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, serta membandingkannya dengan studi sebelumnya. Berikut adalah hasil kajian terkait topik partisipasi petani dalam pemanfaatan *Credit Union* (CU), yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu

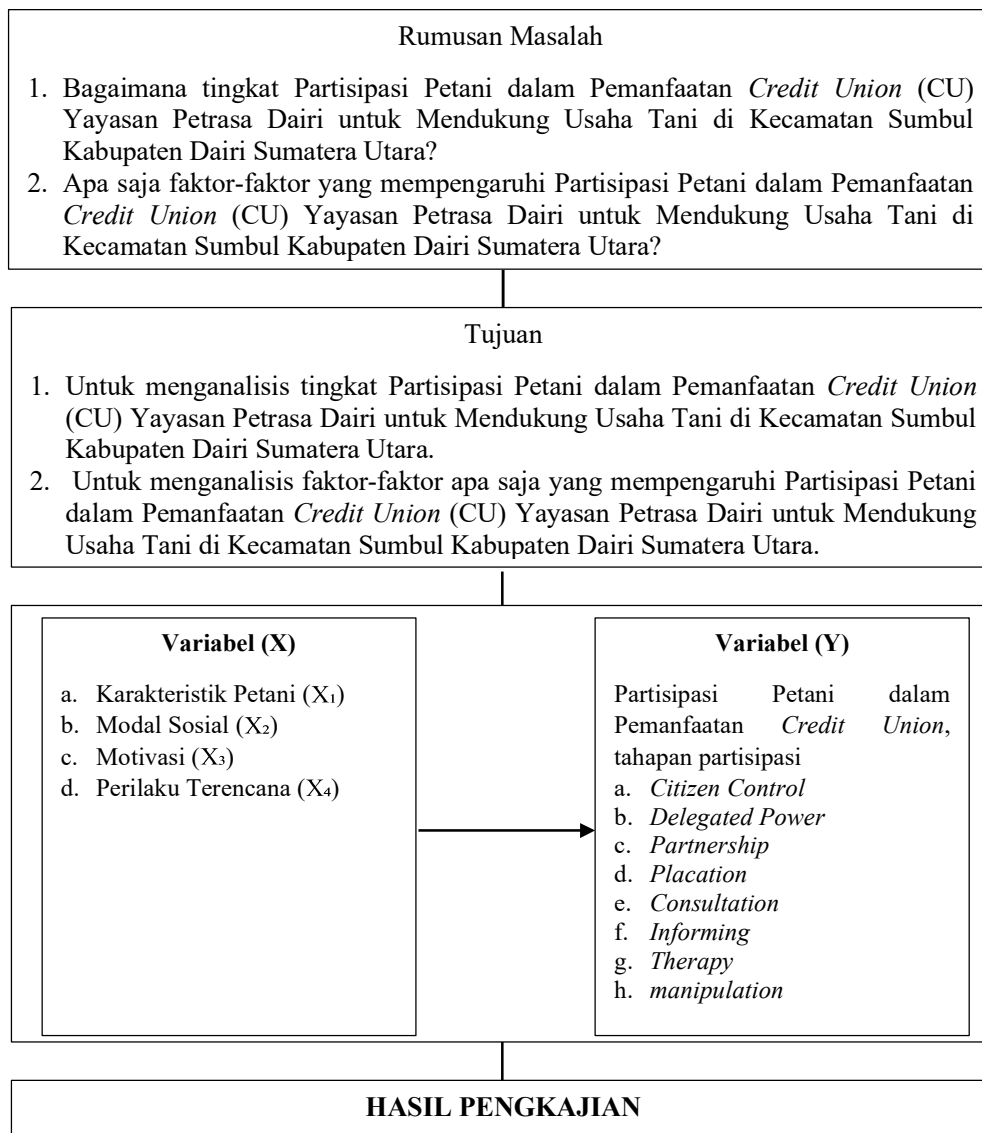
No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Metode	Hasil Pengkajian
1.	Hubungan Karakteristik Individu Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Tambun Kabupaten Tolitoli (Maskur <i>et al.</i> 2023)	1. Usia (X_1) 2. Jenis Kelamin (X_2) 3. Asal Lingkungan (X_3) 4. Tingkat Pendidikan (X_4) 5. Pekerjaan (X_5) 6. Pendapatan (X_6)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Partisipasi masyarakat Kelurahan Tambun tergolong baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat keterlibatan dipengaruhi oleh karakteristik individu seperti jenis kelamin, lingkungan asal, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.
2.	Hubungan Modal Sosial dengan Tingkat Partisipasi Petani dalam Pembangunan Agrowisata Cau Chocolates di Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan (Djelantik <i>et al.</i> 2023)	1. Kepercayaan (X_1) 2. Norma (X_2) 3. Jaringan (X_3)	Metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif dan Spearman Rank Correlation Analysis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh positif terhadap partisipasi petani dalam pembangunan Agrowisata Cau Chocolates, meskipun dengan korelasi sedang. Hal ini terbukti dari nilai korelasi pada tiga tahapan pembangunan yang termasuk dalam kategori sedang.
3.	Pengaruh Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat (Dalimunte <i>et al.</i> 2023)	1. Motivasi (X_1)	Metode kuantitatif	Motivasi (X) memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap partisipasi masyarakat (Y), menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Hal ini didukung oleh mayoritas responden yang secara konsisten menjawab "selalu" dalam kuesioner yang disebar.

Lanjutan Tabel 1.

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Metode	Hasil Pengkajian
4.	Model Perilaku Partisipasi Warga di Bank Sampah (Studi Kasus di Bantul, DIY) (Astuti dan Linarti, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap (X₁) 2. Norma Subjektif (X₂) 3. Persepsi Atas Kendali (X₃) 4. Knowledge of How and What (X₄) 5. Knowledge of Consequences (X₅) 	Studi kasus	Analisis data menunjukkan bahwa variabel sikap, persepsi kendali perilaku, norma subjektif, knowledge of how and what, serta knowledge of consequences secara simultan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi. Secara parsial, semua variabel kecuali norma subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan.
5.	Tingkat Partisipasi Petani Pada Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tani Berbasis Karet Di Kabupaten Musi Rawas (Andry <i>et al.</i> 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan (X₁) 2. Pengalaman Usahatani (X₂) 3. Usia (X₃) 4. Jumlah Anggota Keluarga (X₄) 5. Pendapatan (X₅) 6. Status Kepemilikan Lahan (X₆) 7. Luas Lahan (X₇) 8. Intensitas Pendampingan (X₈) 9. Kepemimpinan (X₉) 	Metode kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata partisipasi responden berada pada tingkat <i>Consultation</i> dengan skor 17, yang mencerminkan <i>Tokenism</i> . Sebanyak 54% responden (25 orang) berada pada tingkat <i>Placation</i> , 24% (11 orang) pada <i>Informing</i> , dan 22% (10 orang) pada <i>Consultation</i> . Selain itu, faktor usia ditemukan sebagai satu-satunya faktor internal yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi petani.
6.	Penguatan Kesadaran Hidup Berkoperasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Pada Ksp Kopdit Pintu Air Cabang Maumere (Loe <i>et al.</i> 2024)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minim Pengetahuan (X₁) 2. Kendala Ekonomi (X₂) 3. Penyalahgunaan (X₃) 4. Komunikasi Terbuka (X₄) 5. Pengambilan Keputusan (X₅) 	Metode deskriptif kualitatif	Penurunan partisipasi anggota dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan tentang koperasi, kendala ekonomi, serta adanya kecurangan atau penyalahgunaan. Upaya peningkatan partisipasi dapat dilakukan melalui edukasi dan pelatihan, komunikasi yang transparan, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji berbagai faktor yang diduga memengaruhi tingkat partisipasi petani dalam pemanfaatan *Credit Union* (CU) Yayasan Petrasa Dairi untuk mendukung usahatani di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Namun, faktor-faktor tersebut belum dapat dipastikan secara signifikan memengaruhi partisipasi, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut melalui penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas maka tersusunlah kerangka pemikiran secara sistematis yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pikir Pengkajian

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang bersifat sementara yang dibuktikan kebenarannya, adapun hipotesis adalah :

1. Diduga partisipasi petani dalam pemanfaatan *Credit Union* (CU) Yayasan Petrasa Dairi untuk mendukung usahatani di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Sumatera Utara di tingkat *partnership*.
2. Diduga faktor-faktor yaitu karakteristik petani, modal sosial, motivasi , dan perilaku terencana mempengaruhi partisipasi petani dalam pemanfaatan *Credit Union* (CU) Yayasan Petrasa Dairi untuk mendukung usahatani di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Sumatera Utara.